

JURNAL PRAXIS IDEALIS

Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan

VOL. 01 NO. 01 | 2024

DOI : [HTTPS://DOI.ORG/10.36859/JP.V1I1.2778](https://doi.org/10.36859/jp.v1i1.2778)

P-ISSN XXXX-XXXX E-ISSN XXXX-XXXX



Received : 2 September 2024 Accepted : 26 Oktober 2024 Published : 26 Oktober 2024

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PADAT KARYA DINAS TENAGA KERJA DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KOTA CIMAHI

Indah Anisa Dewi¹⁾, Atik Rochaeni²⁾, Titin Rohayatin³⁾

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Judul skripsi “**Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Padat Karya Dinas Tenaga Kerja dalam Meningkatkan Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Cimahi**”. Fenomena masalah penelitian kurangnya pemberdayaan masyarakat. Identifikasi masalah bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui program Padat Karya. Tujuan penelitian mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui program Padat Karya dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Unit analisis penelitian Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi dengan 6 informan penelitian. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian pemberdayaan masyarakat melalui program Padat Karya dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dari dimensi merupakan kegiatan yang terencana dan kolektif program Padat Karya berhasil memperbaiki dan memelihara fasilitas. Memperbaiki kehidupan masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat. Prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung, menargetkan masyarakat penganggur. Dilakukan melalui program peningkatan kapasitas, kurangnya dana perbaikan.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Program Padat Karya, Dinas tenaga Kerja, Kemandirian, Kesejahteraan.

Abstract

Thesis title “**Community Empowerment Through the Labor Department's Work-Intensive Program in Increasing Community Independence and Welfare in Cimahi City**”. The research problem phenomenon is lack of community empowerment. Identify the problem of how to empower the community through the Padat Karya program. The research objective is to describe and analyze how community empowerment through the Padat Karya program increases community independence and welfare.

The research method is a descriptive method with a qualitative approach. Cimahi City Manpower Office research analysis unit with 6 research informants. Data collection techniques through library studies and field studies in the form of observation, interviews and documentation. Data analysis techniques through data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of research on community empowerment through the Padat Karya program in increasing community independence and welfare from the dimensions of planned and collective activities, the Padat Karya program succeeded in repairing and maintaining facilities. Improving people's lives, lack of public awareness. Priority for weak or disadvantaged groups, targeting unemployed people. Carried out through capacity building programs, lack of repair funds.

Keywords: Community Empowerment, Labor Intensive Program, Manpower Service, Independence, Welfare.

PENDAHULUAN

Pembangunan dalam suatu Negara merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan tujuan tersebut maka pembangunan dilakukan melalui proses yang terencana dan mencakup semua aspek kehidupan. Pemerintah dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melakukan pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menggali dan mengembangkan keahlian yang dimiliki masyarakat. Untuk merealisasikan hal tersebut perlu adanya kesadaran dan kerjasama dari setiap pihak yang terkait, selain dari pihak Pemerintah adanya pihak masyarakat itu sendiri yang terlibat karena masyarakat memiliki peran penting dalam hal ini.

Pemberdayaan dilakukan secara bersama-sama melalui suatu kegiatan yang bertujuan menjadikan individu atau suatu kelompok masyarakat diharapkan dapat memiliki kemampuan, keberdayaan dan tidak bertumpu terhadap orang lain untuk menyelesaikan permasalahan dan mendorong kesejahteraan hidupnya, kelompok dan orang banyak. Melalui pemberdayaan ini untuk terciptanya sumber daya manusia yang unggul dan bermutu serta memiliki potensi diri. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai

dorongan kemahiran dan keahlian masyarakat untuk mengurus kehidupannya sendiri.

Pemerintahan merupakan bagian dari seluruh kegiatan atau aktivitas dalam proses penyelenggaraan setiap kebutuhan masyarakat yang terjadi dalam sebuah negara yang dijalankan untuk memenuhi setiap urusan yang bertujuan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan memiliki tugas dan fungsi yang harus dijalankan salah satu fungsinya yaitu fungsi pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan dengan ini secara terus menerus berkewajiban untuk berupaya memberdayakan masyarakat agar menjadikan masyarakat yang mandiri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan merupakan salah satu bentuk proses untuk dapat mencapai hal tersebut. Masyarakat dijadikan sebagai subjek dalam kegiatan pemberdayaan. Terlaksananya pemberdayaan akan memperoleh kemampuan dan potensi yang memadai sehingga dapat mencapai kemandirian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini diharapkan sebagai bentuk pembangunan sosial yang mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan menurut Suharto dalam (Oos M. Anwas, 2019:50), indikator pemberdayaan paling tidak memiliki empat hal yaitu: merupakan kegiatan yang terencana dan kolektif, memperbaiki kehidupan masyarakat, prioritas bagi kelompok lemah dan kurang beruntung dan dilakukan melalui program peningkatan kapasitas.

Pemerintah dalam upaya meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat menggulirkan sebuah program sebagai salah satu bentuk pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat dapat mengembangkan kemampuan, keterampilan, dan keahlian masyarakat supaya mampu berdaya saing dan memiliki kreatifitas serta inovasi dalam pengembangan usaha untuk dapat menciptakan

lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan tersebut Pemerintah Kota Cimahi pada tahun 2023 menggulirkan program Padat Karya yang diikuti oleh masyarakat di setiap kelurahan Kota Cimahi sesuai dengan kriteria yang diberikan, selain membantu program pembangunan Pemerintah Kota Cimahi program Padat Karya juga dapat mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Padat Karya merupakan program yang memanfaatkan manusia sebagai sumber daya untuk bisa bekerja di tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah. Program Padat Karya merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat penganggur, setengah penganggur dan miskin dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya lokal yang tersedia dalam upaya meningkatkan produktivitas, aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat. Program Padat Karya sebagai kegiatan dari segi pembangunan yang pada dasarnya memakai sumber daya manusia (SDM) daripada tenaga mesin.

Kebijakan program Padat Karya ditetapkan melalui keputusan Wali Kota Cimahi No.500/kep.994-ekosda/2023 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan One Product One RW, Peduli Lingkungan Bersih dan Padat Karya. Peraturan wali Kota ini disusun dengan tujuan untuk memberikan lapangan pekerjaan sementara bagi masyarakat menganggur dan setengah menganggur dan memberikan sarana dan prasarana akses ekonomi untuk memajukan perekonomian masyarakat.

Adapun fenomena masalah yang peneliti dapatkan sebagai berikut:

1. kurangnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kota Cimahi.
2. Tingginya tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2023 berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Cimahi 10,52% atau 33.192 orang.

3. Masyarakat penganggur di Kota Cimahi belum mampu untuk bersaing dalam mendapatkan pekerjaan.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti ingin mengadakan penelitian lebih lanjut dan menemukan hasil yang akan dituangkan dalam tugas akhir dengan menetapkan judul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Padat Karya Dinas Tenaga Kerja dalam Meningkatkan Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Cimahi”

METODE PENELITIAN

Peneliti melakukan penelitian ini dengan menerapkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif Unit analisis dalam penelitian ini yaitu di Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi yang dijadikan lokasi dan fokus penelitian karena Dinas Tenaga Kerja memiliki tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja wewenang Daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi. Lembaga daerah yang menjadi unit analisis ini akan memberikan informasi yang peneliti butuhkan. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Pemberdayaan dilaksanakan melalui suatu kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan tujuan untuk dapat menjadikan individu maupun kelompok masyarakat untuk dapat menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang dimilikinya dan mampu mengatasi permasalahan atau kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Pelaksanaan

pemberdayaan dapat untuk meningkatkan kesejahteraan, meminimalisir kemiskinan dan meningkatkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat di suatu wilayah sehingga terciptanya masyarakat yang mandiri, aktif dan kreatif.

Pemberdayaan sebagai suatu kegiatan yang berkelanjutan, dinamis, mendorong keterlibatan seluruh potensi yang ada secara bertahap, dengan keseluruhan kontribusi semua potensi. Menggunakan cara ini akan memungkinkan untuk menghasilkan masyarakat yang beradab, penuh keseimbangan kewajiban dan hak, saling menghormati satu sama lain. Hal ini pula yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dalam meningkatkan kesejahteraan dan potensi serta meminimalisir kemiskinan.

Merupakan Kegiatan yang Terencana dan Kolektif

Penyelenggaraan program Padat Karya diserahkan kepada Kelurahan Kota Cimahi. Masyarakat yang berpartisipasi dapat mendaftarkan diri bila sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan atau bisa dihubungi oleh Ketua RT setempat untuk dapat berpartisipasi. Masyarakat yang berpartisipasi dengan bentuk keikutsertaan dan tenaga yang diberikan.

Pengadaan alat pendukung, makan minum dan operasional lainnya disesuaikan dengan kemampuan APBD dan dukungan swadaya masyarakat. Dalam hal ini Pemerintah tidak menyediakan bahan untuk perbaikan jika ada sarana dan prasarana yang rusak, dikarenakan jika ada gorong-gorong yang roboh pun Pemerintah tidak memberikan dana, melainkan menggunakan swadaya masyarakat untuk dapat memperbaiki gorong-gorong tersebut.

Perencanaan Padat Karya berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kegiatan Padat Karya dengan melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana, tetapi hal ini hanya berjangka pendek karena

masyarakat tersebut belum adanya kesadaran atau rasa tanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan Padat Karya untuk melestarikan lingkungan. Setelah berhasil melaksanakan Padat Karya ini, wilayah yang tadinya sudah terpelihara besoknya bisa kotor kembali. Disini peran masyarakat dan kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan.

Program Padat Karya juga dapat mengembalikan semangat masyarakat dikarenakan Padat Karya dapat merangsang masyarakat sehingga ter gerakan untuk lebih produktif lagi dalam mencari kerja. Sehingga dapat mengembalikan kebiasaan yang telah jarang dilakukan yaitu gotong royong, gotong royong dahulu merupakan kegiatan yang biasa dilakukan masyarakat meskipun tanpa perlu ada arahan dari suatu program. Selain masyarakat yang terbantu, Dinas Tenaga Kerja juga terbantu dengan adanya program Padat Karya ini dikarenakan Padat Karya mempermudah Dinas Tenaga Kerja dalam mencari orang melalui data yang tersedia hasil dari data peserta yang menganggur atau setengah menganggur untuk disalurkan ke pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja akan memberikan informasi melalui WhatsApp kepada masyarakat yang telah terdaftar di program Padat Karya, oleh karena itu kegunaan menyertakan AK1 untuk mempermudah Dinas Tenaga Kerja untuk memasukan masyarakat tersebut ke dalam daftar pengangguran terbuka Kota Cimahi.

Memperbaiki Kehidupan Masyarakat

Padat Karya hanya melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana seperti bersih-bersih, masyarakat dalam hal ini saling bekerja sama dalam pemeliharaan infrastruktur agar fasilitas umum berfungsi dengan baik. Namun bukan hanya perlu melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana tapi diperlukan pemeliharaan agar apa yang telah dilaksanakan tidak menjadi sia-sia. Dari pihak

Ketua RW pun untuk terus mensosialisasikan kepada masyarakat untuk terus menjaga lingkungan dan dari sisi masyarakatnya pun diperlukan kesadaran masyarakat menjaga lingkungannya, dimulai dari menjaga wilayah sekitar rumahnya sendiri. Hal tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi pelestarian lingkungan serta sarana dan prasarana yang telah diperbaiki, sehingga dapat meminimalisir kerusakan dan meminimalisir biaya perbaikan.

Dampak sebelum dan sesudah pelaksanaan Padat Karya disini yang dirasakan masyarakat adanya perubahan ke arah yang lebih baik karena setelah kegiatan Padat Karya, lingkungan di sekitar jadi lebih terawat dibandingkan sebelumnya. Namun pemeliharaan infrastruktur tersebut kembali lagi kepada kesadaran masyarakat karena pemeliharaan yang tepat membantu memperpanjang masa pakai fasilitas. Dari sini dapat dilihat, bahwa selain sudah berpartisipasi menyumbangkan waktu dan tenaga selanjutnya masyarakat memiliki peran yang sangat besar untuk tetap menjaga apa yang sudah diperoleh.

Prioritas Bagi Kelompok Lemah dan Kurang Beruntung

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang memiliki arti berupa dorongan atau motivasi, bimbingan serta pendampingan dalam mengembangkan kemampuan individu atau masyarakat untuk dapat mandiri. Upaya tersebut merupakan sebagai tahapan dari proses pemberdayaan dalam mengubah kebiasaan lama menuju perilaku yang lebih baik lagi dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan pengupahan sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pengupahan yang diberikan merupakan sebagai penyemangat untuk masyarakat untuk dapat berpartisipasi ke dalam kegiatan ini setelah

masyarakat menyelesaikan kegiatan ini, masyarakat akan dibayar oleh panitia yang ada. Uang yang diberikan hanya dijadikan uang perangsang kerja saja agar masyarakat tertarik untuk mencari kerja lagi dan hasil dari uang tersebut bisa dijadikan modal.

Meskipun sebagian masyarakat yang berpartisipasi dikarenakan adanya sistem pengupahan yang diberikan. Meski begitu masyarakat telah berpartisipasi dalam bentuk tenaga terutama dalam kegiatan pembangunan non fisik, seperti melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana dengan melakukan gotong royong bersama untuk menjaga kebersihan yang dilakukan oleh masyarakat yang menganggur dan setengah menganggur dengan kategori masuk dalam usia produktif 17 sampai 64 tahun.

Pengupahan yang diberikan sesuai dengan berapa kali masyarakat mengikuti kegiatan ini. UPK yang di dapatkan dalam sehari yaitu tujuh puluh lima ribu rupiah (75.000) dalam sehari dengan waktu 3 jam kerja dari jam 9 sampai jam 11 dan belum termasuk pajak, dipotong pajak 3% menjadi tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah (72.250), upah bersih yang diterima masyarakat lalu dikalikan berapa kali masyarakat mengikuti kegiatan ini di akhir diakumulasikan sesuai dengan apa saja yang telah dikerjakan.

Dilakukan Melalui Program Peningkatan Kapasitas

Program peningkatan kapasitas merupakan suatu proses dalam melakukan serangkaian kegiatan dengan membuat perubahan bagi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat menjadikan masyarakat yang produktif serta dapat meningkatkan potensi yang dimiliki. Dalam peningkatan kapasitas aspek terpenting dari pelaksanaan proses tersebut merupakan masyarakat itu sendiri. Proses peningkatan kapasitas ini harus menjadi sebuah proses yang dimiliki, dikuasai dan dilangsungkan oleh masyarakat

itu sendiri karena masyarakat lah yang mengerti apa yang dibutuhkan, potensi dan sumber daya yang masyarakat miliki.

Masyarakat ikut terlibat dalam partisipasi ketika dilakukannya pembangunan, maka masyarakat juga lah yang tahu dan merasakan jika ada kekurangan dari fasilitas yang dimiliki. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan tenaga dan berpartisipasi dengan membawa peralatan kebersihan selama Padat Karya berjalan seperti sapu, pengki, cangkul dan hal lain yang mendukung pelaksanaan proses pemeliharaan lingkungan. Terkait upah yang diberikan sebenarnya diperbolehkan tidak menjadi masalah tetapi masih ada yang menganggap kontra dengan pengupahan ini, tetapi pengupahan ini sebenarnya diperbolehkan karena ada dalam peraturan tenaga kerja.

Dalam pelaksanaan program pasti ada kelebihan yang di dapatkan, tetapi pasti tidak luput dari yang namanya kekurangan. Adanya kekurangan selama proses pelaksanaan bukan berarti menandakan hal tersebut gagal. Begitu pula dengan Padat Karya di dalam pelaksanaannya terdapat kelebihan dan kekurangan yang dialami. Kelebihan program Padat Karya menjadikan masyarakat penganggur dan setengah penganggur menjadi lebih produktif, setidaknya ada yang mereka kerjakan dan dari hasil tersebut mendapatkan upah yang bisa digunakan untuk kehidupan nya masing-masing dengan sehari kerja mendapatkan 72.250 rupiah di kali 5 hari kerja yang berarti akan mendapatkan 361.250 rupiah upah bersih.

Kekurangannya dari Pemerintah Daerah lebih ke arah persyaratan yang diberikan, ketika sudah dibentuk Juklak dan Juknis nya masyarakat protes karena dianggap terlalu berat persyaratan nya karena di persyaratan nya menggunakan AK1, oleh karena itu di pelaksanaan tahun ini 2024 di evaluasi sehingga AK1

dihilangkan. Kekurangan yang dialami di lapangan berupa sampah yang dihasilkan dari beres-beres membersihkan rumput dan lain-lain tidak langsung dibuang malah ditumpuk di pinggir jalan, mengakibatkan masyarakat menganggap tempat itu menjadi tempat sampah umum, oleh karena itu untuk mengatasi hal itu berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, tetapi belum tentu maksimal dikarenakan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup terbatas.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dengan mengumpulkan data-data berupa observasi dan wawancara. Kemudian peneliti menganalisis data sesuai aktivitas yang ditemukan dan menguji kebasahan data yang telah peneliti uraikan sebelumnya terkait Pemberdayaan masyarakat melalui program Padat Karya Dinas Tenaga Kerja dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di Kota Cimahi. Masyarakat dalam kegiatan Padat Karya memiliki rasa yang antusias yang tinggi, pada tahun 2023 jumlah peserta yang berpartisipasi 17824 orang. Pengembangan sarana dan prasarana melalui Padat Karya berupa pembangunan dengan cara memperbaiki yang sudah ada seperti memperbaiki saluran air, gorong-gorong, pengecatan kantor RW dan pembangunan non fisik dengan melakukan pemeliharaan melalui bersih-bersih. Meskipun pembangunan ini dilakukan sementara bukan dalam jangka waktu panjang, hasilnya dapat dilihat dan dirasakan. Peserta yang mengikuti program Padat Karya di kelompokan dalam satu kelompok minimal berjumlah 20 orang dari warga setempat untuk melakukan satu atau beberapa kegiatan. Sistem pengupahan yang menambah semangat masyarakat untuk ikut serta dalam Padat

Karya. UPK yang diberikan untuk per orang dengan jam kerja 3 jam kerja sehari dari jam 9 sampai 11 mendapatkan 75.000 rupiah dengan potongan pajak 3% menjadi 72.250 rupiah.

DAFTAR PUSTAKA

Oos M. Anwas. (2019). *Pemberdayaan masyarakat di era global*. Alfabeta.

